

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang sangat penting atau dominan untuk mengukur suatu kemampuan di suatu daerah negara tersebut dalam memproduksi barang dan jasa dengan periode yang ditentukan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses adanya peningkatan pendapatan perkapita suatu negara selama kurun waktu yang panjang (Meier, dalam Kuncoro, 2006). Begitupun halnya yang dijelaskan Todaro (2000), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses terencana yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja namun merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial atau menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dari aspek materi.

Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari permasalahan ketidakmerataan atau kesenjangan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Itu berarti pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi belum tentu dapat mengatasi permasalahan yang ada di suatu wilayah tersebut. Seperti yang dijelaskan Kuncoro (2002) yang relevan dengan kondisi di daerah bahwa

pertumbuhan ekonomi hanya merupakan syarat tetapi tidak mencukupi bagi proses pembangunan. Bahkan Arsyad (2010) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya mempunyai sedikit manfaat dalam memecahkan masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi yang timpang.

Arsyad (1999:108) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kewajiban dari masing-masing daerah adalah memaksimalkan potensi ekonomi daerahnya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang sudah direncanakan, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perekonomian tersebut.

Desentralisasi atau sering disebut otonomi daerah, menurut (Khusaini 2006) desentralisasi memiliki arti umum sebagai pelimpahan wewenang pusat ke level pemerintahan yang ada dibawahnya. Otonomi daerah juga sebagai produk undang-undang yang dijadikan dasar untuk melakukan pembangunandaerah secara mandiri dengan menggunakan sumber daya dan potensi daerah itu sendiri. Undang-Undang tersebut yang melimpahkan kepada pemerintah daerah kewenangan lebih untuk melakukan perencanaan pembangunan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah pun memiliki peran dalam mengelola rumah tangganya dan mampu untuk membiayai operasional rumah tangga tersebut secara mandiri. Tetapi,

konsekuensi yang dihadapi pemerintah daerah harus bekerja lebih agar mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi daerah ialah mekanisme pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat serta mewujudkan kerjasama antara sektor swasta dengan pemerintah daerah yang akan membentuk kesempatan kerja baru dan mampu menstimulus perkembangan kegiatan ekonomi wilayah tersebut (Arsyad 1999). Dengan pembangunan ekonomi yang baik akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi pun sebaiknya berkesinambungan agar tercapainya tujuan pembangunan yang adil dan makmur. Pada hakekatnya, pembangunan daerah sebagai usaha untuk menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki, serta melakukan pergeseran peranan ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder ataupun tersier. Hanya saja, potensi dan karakteristik sumber daya yang digunakan dalam sektor perekonomian berbeda-beda menyebabkan tidak meratanya pembangunan daerah pada setiap sektor. Tidak meratanya tersebut akan memunculkan ketimpangan tiap daerah yang berdampak pada tingkat kesejahteraan. Maka dari itu, pembangunan ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah selayaknya mengacu pada potensi dan karakteristik sumber daya yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur dalam pembangunan ekonomi daerah yang digunakan untuk membuat kebijakan prioritas dalam mengembangkan, meningkatkan, dan mendayagunakan sumber daya secara

optimal. (Arsyad 1999) menjelaskan peran vital yang dimiliki oleh pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah akan berimplikasi kepada permintaan barang dan jasa. Seperti halnya kegiatan perekonomian di daerah tersebut menggunakan sumber daya lokal, memberdayakan pekerja dan bahan mentah lokal untuk membuat komoditas yang memiliki daya jual tinggi. Sejalan dengan itu, maka industri tersebut akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, maka dampak dari pertumbuhan tersebut akan mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Adapun sektor-sektor ekonomi yang merupakan komponen PDRB secara umum adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan perusahaan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Sektor-sektor ekonomi tersebut bisa dijadikan indikator oleh pemerintah daerah dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah serta sebagai indikator dalam pembangunan di masa mendatang.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pulau Sumatera yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Yang dimana setiap kabupaten dan kota masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang khas sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing sehingga akan mempunyai PDRB, tingkat pertumbuhan dan prioritas sektor yang berbeda-beda pula. Dalam penelitian ini daerah yang akan diteliti yaitu 7 kota yang ada di provinsi Sumatera

Barat. Laju pertumbuhan ekonomi 7 kota tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Padang	39.675.728,60	42.081.536,73	44.456.786,18	43.631.942,85	45.227.956,56
2.	Solok	2.580.783,66	2.726.707,11	2.876.461,35	2.835.750,32	2.936.827,72
3.	Sawah Lunto	2.517.150,16	2.655.619,77	2.796.536,45	2.760.924,18	2.829.590,03
4.	Padang Panjang	2.312.713,05	2.444.773,80	2.580.604,24	2.543.403,93	2.631.518,09
5.	Bukittinggi	5.483.398,44	5.812.391,14	6.152.076,98	6.045.085,08	6.263.129,76
6.	Payakumbuh	3.997.854,36	4.238.662,76	4.488.210,66	4.413.983,73	4.571.926,96
7.	Pariaman	3.234.234,59	3.411.294,75	3.592.021,58	3.544.659,85	3.669.629,10
Provinsi Sumatera Barat		155.984.364,13	163.996.189,04	172.205.571,30	169.416.717,87	174.996.062,29

Sumber Data: BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, 2022

Tabel 1.1 diatas memperlihatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021. Pada tabel menunjukkan pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat 3 tahun berturut mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 PDRB Sumatera Barat mengalami penurunan yang semula pada tahun 2019 sebesar Rp172.205.571,30 menjadi Rp169.416.717,87 di tahun 2020. Diketahui Kota Padang sebagai penyumbang PDRB terbesar di Sumatera Barat, yang selama 3 tahun berturut PDRB Kota Padang mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 PDRB Kota Padang menurun menjadi Rp43.631.942,85 yang semula di tahun 2019 sebesar Rp44.456.786,18. Sedangkan kota yang mempunyai PDRB terendah dalam kurun waktu lima tahun dibandingkan kota lainnya yaitu Kota Padang panjang yang memiliki PDRB dibawah 3 triliun rupiah dalam lima tahun berturut-turut. Hal ini memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah yang

terkhususnya untuk Kota Padang Panjang yang mempunyai PDRB yang paling rendah dari kota lain yang ada di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.2
PDRB Provinsi Sumatera Barat ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha 2017-2021
(Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha (Sektor)	PDRB Sumatera Barat				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35 394 694,21	36 639 598,72	37 549 456,64	37 983 473,62	38 815 219,78
2	Pertambangan dan Penggalian	6 338 267,17	6 705 049,43	7 121 860,25	7 028 907,62	6 904 546,01
3	Industri Pengolahan	16 540 818,12	16 444 840,00	16 118 645,66	16 031 823,24	16 621 259,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	168 196,62	175 079,95	182 441,03	170 025,43	175 372,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	156 736,19	160 240,92	170 012,80	168 252,33	177 555,32
6	Konstruksi	14 075 895,58	15 061 089,08	16 336 311,64	15 854 144,46	16 200 236,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24 279 260,45	25 976 541,84	27 869 924,72	27 552 851,94	28 962 579,89
8	Transportasi dan Pergudangan	18 762 202,18	19 969 549,69	20 918 710,72	17 551 706,52	18 001 505,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 693 494,32	1 832 878,56	1 981 559,38	1 665 504,50	1 759 223,69
10	Informasi dan Komunikasi	10 802 637,25	11 723 224,81	12 746 455,37	13 963 888,87	14 860 125,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4 619 805,20	4 665 415,80	4 772 024,52	4 836 004,22	5 244 995,57
12	Real Estat	3 025 615,61	3 166 853,19	3 381 414,79	3 388 828,92	3 470 473,90
13	Jasa Perusahaan	685 063,40	722 425,15	767 245,89	736 705,29	745 035,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8 659 075,43	9 175 850,47	9 814 875,90	9 757 157,14	9 840 451,81
15	Jasa Pendidikan	5 954 627,35	6 382 703,06	6 889 400,02	7 235 888,67	7 368 894,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2 154 588,55	2 311 450,41	2 485 722,57	2 705 243,08	2 864 364,95
17	Jasa lainnya	2 673 386,50	2 883 397,98	3 099 509,41	2 786 312,02	2 984 222,60
	Produk Domestik Regional Bruto	155 984 364,13	163 996 189,04	172 205 571,30	169 416 717,87	174 996 062,29

Sumber Data: BPS Sumatera Barat, 2017-2021

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha tahun 2017-2019 cenderung meningkat, namun pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB tersebut mengalami penurunan, hal tersebut terjadi dikarenakan terganggunya kinerja sektor ekonomi yang disebabkan oleh

pandemi covid-19. Tabel menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penghasil terbesar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat tahun 2017-2021. Kemudian sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan penghasil PDRB terendah di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, maka penulis memutuskan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Dalam Upaya Pembangunan Perekonomian Kota di Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Sektor basis ekonomi apakah yang dapat meningkatkan perekonomian kota di provinsi Sumatera Barat?
2. Sektor ekonomi apakah yang memiliki potensi dan keunggulan kompetitif untuk dapat dikembangkan sebagai penggerak perekonomian kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana kontribusi dan kinerja sektor ekonomi kota di provinsi Sumatera Barat terhadap PDRB kota di provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sektor basis ekonomi pada kota di provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan perekonomian di provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui sektor perekonomian yang berpotensi dan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat digunakan sebagai penggerak perekonomian kota di provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kontribusi dan kinerja sektor ekonomi kota terhadap PDRB kota provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran dari sektor perekonomian kota di provinsi Sumatera Barat, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi untuk penelitian serupa di masa mendatang.